Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2025, Page: 24957-24962

DAMPAK URBANISASI TERHADAP AKSES WARGA MISKIN URBAN TERHADAP HAK LAYANAN PUBLIK (Studi Pada Pekerja Informal Di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang)

Dwi Nuraeni[1] Taufik Ahkyar[2] Hatta Azzuhri[3]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
dwinuraeni002@gmail[1].com taufikahkyar_uin@radenfatah.ac.id[2] hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id[3]

Published: April 2026

ABSTRAK

Urbanisasi pesat berdampak signifikan terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat miskin urban di sektor informal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan akses layanan administrasi kependudukan bagi pekerja sektor informal di Kelurahan Talang Betutu, Kota Palembang. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh batu bata, pedagang kaki lima, dan supir truk dengan sistem upah harian. Kondisi ekonomi yang fluktuatif serta rigiditas waktu kerja menyebabkan keterbatasan akses pengurusan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Selain itu, status pendatang dan ketiadaan dokumen dasar menjadi faktor determinan yang memicu eksklusi administratif dalam mengakses bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan hak politik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hambatan administratif merupakan bentuk persistensi ketidakadilan sosial, bukan sekadar persoalan teknis. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih proaktif, inklusif, dan responsif guna menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Kata Kunci: Urbanisasi, Sektor Informal, Administrasi Kependudukan, Akses Layanan Publik, Marginalisasi Sosial

ABSTRACT

Rapid urbanization significantly impacts the socio-economic dynamics of the urban poor in the informal sector. This study aims to analyze the barriers to accessing population administrative services for informal sector workers in Talang Betutu Village, Palembang. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the majority of residents work as brickmakers, street vendors, and truck drivers under a daily wage system. Flctuating economic conditions and work-time rigidity lead to limited access to managing administrative documents such as Family Cards (KK) and Identity Cards (KTP). Furthermore, migrant status and the absence of basic documents serve as determinant factors triggering administrative exclusion from social assistance, health insurance, and political rights. This phenomenon indicates that administrative barriers are a form of persistent social injustice rather than mere technical issues. Therefore, policy transformation through proactive, inclusive, and responsive population administration is required to guarantee the fulfillment of the constitutional rights of all citizens.

Keywords: Urbanization, Informal Sector, Population Administration, Access to Public Services, Social Marginalization

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan fenomena demografi krusial yang sering kali diikuti oleh transformasi fisik dan sosial yang kompleks (Sabitha, 2022; Davis, 1987). Di Indonesia, kuatnya faktor pendorong desa dan daya tarik ekonomi kota memicu migrasi masif yang menciptakan kesenjangan standar hidup

signifikan (Tjiptoherijanto, 1999). Urbanisasi yang tidak terkendali berisiko memicu persoalan baru, seperti pemukiman kumuh dan pengangguran (Aprilia & Tiarawati, 2023), yang dampaknya paling nyata dirasakan oleh pekerja sektor informal dengan karakteristik upah harian tidak menentu (Harsono dkk., 2024).

Dalam mewujudkan kota inklusif, dokumen kependudukan seperti KTP dan KK menjadi prasyarat mutlak untuk mengakses layanan publik dasar (Hasna dkk., 2025; Rapidah, 2023). Namun, tingginya angka penduduk tidak tercatat (*unregistered*) akibat migrasi masal sering kali menyebabkan sistem pelayanan menjadi lambat dan diskriminatif (Putri & Ariany, 2023).

Kegagalan administratif ini menciptakan hambatan fundamental berupa ketiadaan pengakuan hukum yang memperkuat marginalisasi kelompok miskin (Savana & Qomariyah, 2024). Kelurahan Talang Betutu di Palembang mencerminkan dinamika tersebut. Sebagai kawasan suburban, wilayah ini memiliki konsentrasi pekerja informal yang tinggi, seperti buruh batu bata dan supir truk. Observasi awal menunjukkan bahwa rigiditas waktu kerja dan status sebagai pendatang menjadi penghalang utama dalam pengurusan administrasi, yang berujung pada eksklusi hak sipil dan politik. Penelitian ini krusial untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi pemerintah dan implementasi lokal. Hasilnya diharapkan memberikan evaluasi kritis bagi kebijakan pemerintah daerah yang lebih inklusif serta memperkaya literatur Administrasi Publik terkait tata kelola urbanisasi di Indonesia.

Sebagai penguatan analisis, fenomena yang terjadi di Kelurahan Talang Betutu juga menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya berdampak pada perubahan struktur ekonomi, tetapi turut membentuk pola kerentanan baru yang bersifat struktural dan berulang. Peralihan dari sektor agraris ke sektor informal perkotaan menciptakan ketergantungan pada pekerjaan berupah harian yang tidak stabil, sehingga mempersempit kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun mengurus aspek administratif. Dalam kondisi ini, tekanan ekonomi pascapandemi serta perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital semakin memperlemah daya saing pelaku usaha kecil dan pekerja informal. Akibatnya, mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan pengurusan dokumen kependudukan, yang justru memperkuat siklus eksklusi sosial. Jika dilihat dari perspektif *right to the city*, kondisi ini menegaskan bahwa proses urbanisasi belum mampu menghadirkan distribusi manfaat kota yang adil, melainkan justru menempatkan pekerja informal sebagai kelompok marginal yang berkontribusi pada ekonomi kota tanpa memperoleh akses yang setara terhadap layanan, ruang, dan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena marginalitas struktural pekerja informal di Kelurahan Talang Betutu, Palembang. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan *thick description* terkait hambatan akses layanan publik akibat urbanisasi (Sugiyono, 2018). Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi pekerja sektor informal seperti buruh batu bata, pedagang kaki lima, dan supir truk yang tergolong miskin urban. Selain itu, Ketua RT dan staf pemerintah setempat dilibatkan sebagai informan pendukung guna memperkuat perspektif kebijakan dan validitas data. Penelitian dilakukan di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, yang merupakan kawasan peri-urban dengan konsentrasi pekerja informal yang tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi (data pemerintah, BPS, dan foto lapangan). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan kutipan, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji dampak urbanisasi terhadap pekerja sektor informal dalam menciptakan hambatan struktural akses layanan publik bagi warga miskin urban di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara kerentanan sosial-ekonomi, status administratif, dan akses layanan publik dengan menggunakan perspektif *right to the city* dari David Harvey.

1. Dampak Urbanisasi terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Pekerja Informal

Urbanisasi di Talang Betutu mendorong transformasi signifikan dari masyarakat agraris menuju pekerja sektor informal perkotaan yang ditandai dengan ketidakstabilan pendapatan dan tingginya ketergantungan pada pekerjaan berbasis harian seperti industri batu bata dan perdagangan kecil. Temuan lapangan menunjukkan bahwa migrasi ke kota didorong oleh harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, namun realitas yang dihadapi justru berupa keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal akibat minimnya pendidikan dan keterampilan. Sektor informal memang menyediakan akses kerja yang mudah, tetapi bersifat eksploitatif karena tidak memberikan jaminan ekonomi jangka panjang, perlindungan kerja, maupun mobilitas sosial. Selain itu, disrupsi ekonomi pascapandemi dan perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital turut menekan pendapatan pelaku usaha kecil, sehingga mempersempit ruang bertahan hidup mereka. Kondisi ini memaksa pekerja informal memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan urusan administratif, sehingga memperkuat siklus kerentanan. Dalam perspektif *right to the city*, situasi ini menunjukkan bahwa urbanisasi tidak menghasilkan distribusi manfaat kota yang adil, melainkan menciptakan kelas pekerja marginal yang hanya menjadi penopang ekonomi tanpa memperoleh hak penuh atas kesejahteraan.

2. Status Kependudukan dan Legalitas Administratif

Status kependudukan menjadi hambatan krusial bagi pekerja informal, di mana sebagian besar pendatang tidak melakukan mutasi dokumen karena terkendala biaya transportasi, kehilangan waktu kerja, serta kompleksitas prosedur yang mengharuskan pengurusan di daerah asal. Akibatnya, mereka tetap menggunakan KTP luar daerah dan terjebak dalam status administratif non-permanen yang membatasi akses terhadap hak sosial. Temuan menunjukkan adanya praktik "administrasi simbolis", di mana warga merasa cukup diakui secara sosial melalui pelaporan kepada RT tanpa mengurus legalitas formal. Fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara sistem birokrasi negara yang kaku dengan realitas mobilitas masyarakat miskin urban. Secara lebih dalam, kondisi ini memperlihatkan adanya dilema rasional, di mana warga memilih mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan hidup dibandingkan untuk memenuhi kewajiban administratif yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung. Dalam kerangka *right to the city*, hal ini menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi sebagai mekanisme eksklusi yang secara halus menyingkirkan kelompok marginal dari pengakuan hukum, sehingga mereka tetap berada di posisi "setengah diakui" dalam struktur perkotaan.

3. Akses terhadap Layanan Publik

Akses terhadap layanan publik di Talang Betutu menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada kepemilikan dokumen administratif lokal, sehingga pekerja informal yang tidak memiliki KTP atau KK setempat mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh layanan dasar seperti jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan akses permodalan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga harus menghadapi pilihan rasional antara kehilangan waktu kerja untuk mengurus administrasi atau tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan harian, sehingga layanan publik menjadi sulit dijangkau. Selain itu, sistem zonasi pendidikan, persyaratan BPJS, serta mekanisme pendataan bantuan sosial berbasis dokumen memperkuat eksklusi terhadap kelompok pendatang. Keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi dari pemerintah semakin memperlebar kesenjangan akses, sehingga banyak warga tidak memahami prosedur atau hak yang seharusnya mereka terima. Kondisi ini menjadikan layanan publik yang seharusnya universal berubah menjadi selektif dan eksklusif. Dalam perspektif *right to the city*, fenomena ini mencerminkan ketidakadilan spasial, di mana distribusi layanan kota tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada kelengkapan administratif yang tidak inklusif.

4. Hambatan Struktural dalam Birokrasi Pelayanan Publik

Hambatan dalam akses layanan publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan hasil dari struktur birokrasi yang kaku dan tidak adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pekerja informal. Persyaratan administratif seperti kewajiban surat pindah, dokumen lengkap, serta prosedur berlapis

menciptakan beban yang tidak proporsional bagi warga dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, keterbatasan kewenangan aparat di tingkat RT dan kelurahan membuat mereka tidak mampu memberikan solusi fleksibel meskipun memahami kondisi warga. Ketimpangan distribusi informasi juga memperparah situasi, karena warga cenderung menghindari birokrasi yang dianggap rumit dan tidak ramah. Temuan ini menunjukkan adanya bias kelas dalam sistem pelayanan publik, di mana birokrasi lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki waktu, biaya, dan literasi administratif yang memadai. Dalam perspektif *right to the city*, kondisi ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana aturan administratif berfungsi sebagai alat kontrol yang membatasi akses kelompok marginal terhadap hak-haknya.

5. Eksklusi Sosial dan Administratif

Akumulasi dari kerentanan ekonomi, keterbatasan legalitas, dan hambatan struktural birokrasi menghasilkan eksklusi sosial dan administratif yang bersifat sistemik bagi pekerja informal di Talang Betutu. Mereka tidak hanya terpinggirkan dari akses layanan publik, tetapi juga mengalami penghapusan simbolik dalam sistem negara melalui fenomena invisibilitas administratif, terutama dalam sistem digitalisasi pendataan yang hanya mengenali warga dengan dokumen resmi. Kondisi ini berdampak pada hilangnya akses terhadap bantuan sosial, melemahnya partisipasi sosial, serta munculnya perasaan terasing dan tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat kota. Selain itu, terdapat ketimpangan antara kontribusi ekonomi pekerja informal dengan pengakuan yang mereka terima, di mana mereka tetap menjadi penopang ekonomi lokal tetapi tidak memperoleh perlindungan yang layak. Dalam perspektif *right to the city*, fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak warga untuk diakui, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan kota. Dengan demikian, eksklusi administratif bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang mempermanenkan posisi marginal kelompok miskin urban.

KESIMPULAN

Urbanisasi di Kelurahan Talang Betutu membuktikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan, melainkan sering kali memperluas kelompok marginal melalui hambatan struktural yang kompleks. Pekerja sektor informal terjebak dalam eksklusi ganda: secara ekonomi melalui ketidakpastian upah harian, dan secara administratif melalui sistem kependudukan yang kaku dan tidak adaptif. Ketiadaan dokumen formal seperti KTP lokal memutus akses fundamental terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, dan hak politik, yang pada gilirannya memicu respons berupa perlawanan pasif dan penarikan diri dari partisipasi publik sebagai strategi bertahan hidup di luar sistem negara.

Fenomena ini menegaskan kegagalan pemenuhan *right to the city*, di mana kontribusi ekonomi pekerja informal tidak diikuti oleh pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. Administrasi kependudukan dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme eksklusi sistemik yang memperkuat ketidakadilan spasial dan marginalisasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan melalui simplifikasi prosedur administrasi kependudukan yang lebih proaktif dan inklusif. Penataan layanan publik harus dipandang sebagai isu politik terkait keadilan warga negara, guna memastikan bahwa hak-hak konstitusional seluruh masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang diskriminatif.

REFERENCES

Amaya, S. N., Mubarak, A., & Raharja, R. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *2*(4), 116-126.

Aprilia, S. N., & Tiarawati, F. (2025). Permasalahan urbanisasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Strategis (JKEMAS)*, 1(1), 37.

Atika, F. A., & Ikaputra. (2023). Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara). *Media Komunikasi Geografi (MKG)*, 24(2), 168–188.

Bandiyono, S., & Indrawardani, A. (2010). Migrasi penduduk desa–kota, urbanisasi, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(2), 1–15.
Firdasari, K. A., & Hardjati, S. (2023). Optimalisasi Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Datang di Kelurahan Panjangjiwo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 407-416.
Gusty, R. P. P. (2025). Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Warga Non-Permanen dalam Memitigasi Urbanisasi di Kota Surabaya. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, *2*(3), 59-71.
Harsono, I., Kurniawan, D., Ramadhan, R., Cakranegara, P. A., & Rachmat, T. A. (2024). Pemberdayaan pekerja informal: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan urban. *Community Development Journal*, *5*(1), 1849-1855.
Harvey, D. (2012). *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. London, England: Verso.
Hasna, A. N., Putri, R. A., & Azzahra, F. (2025). Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dukcapil) Kota Serang Dalam Pemenuhan Hak Anak: Studi Literatur Pada Layanan KTP, KK, dan Akta Kelahiran. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, *9*(12).
Khairi, D. A., & Marsoyo, A. (2022). Sektor informal: Peninjauan kembali dalam perspektif konseptual. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan*, 17(2), 360–386.
Mansur. (2012). Problematika Urbanisasi. *Al-Munzir*, *5*(1), 69-80.
Marias, P. (2019). Hubungan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)*, 6(1).
Noveria, M. (2010). Fenomena Urbanisasi dan Kebijakan Penyediaan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *5*(1), 17-36.
Peda, M. S. (2017). Aspek Sosial Ekonomi Pelaku Urbanisasi di Denpasar (Kasus Urbanisasi dari Desa Weelonda Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya). *DwijenAGRO*, *7*(1).
Pida, D. F., Aini, K. N., & Putri, C. A. (2025). Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Kota di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Ekonomi Pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 226-238.
Purba, K. (2024). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam peningkatan akses layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 1–13.
Putri, D. T., & Ariany, R. (2023). Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Pencerah Publik*, *10*(2), 72-81.
Putri, S. N. R. A., & Simangunsong, F. (2023). Perlindungan Hukum Penduduk Non Permanen yang Tidak Memiliki SKPNP dalam Administrasi Kependudukan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(6), 611-616.
Rapidah, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Kota Inklusif: Kasus Pelayanan E-KTP di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022. *JOM FISIP (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)*, *10*(1).
Rijal, M., & Tahir, A. (2022). Analisis faktor pendorong urbanisasi di wilayah perkotaan (studi kasus Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies (JE3S)*, 3(1), 1–10.
Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantin, K. (2021). Kinerja pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Kinerja*, 18(2), 165–176.
Sabitha, F. A. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Keterisediaan Lahan Permukiman Perumahan di Kota Surabaya. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, *11*(1), 127-142.
Savana, A. N., & Qomariyah, S. (2024). Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 239-256.
Seran, G. G., Syafitri, R. A., & Pratidina, G. (2024). Pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1–12.
Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Tahir G., M., Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Dinamika Kesenjangan Sosial di Perkotaan: Studi Kasus pada Komunitas Miskin di Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 329-336.

Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, *10*(2), 57-72.
Wilonoyudho, S. (n.d.). *Urbanization and regional imbalances in Indonesia*. Indonesian Journal of Geography, 43(2), 1–15.